

## KAJIAN TEORITIS: MODEL E-GOVERNMENT READINESS PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KEBERHASILAN E-GOVERNMENT

Stevanus Wisnu Wijaya<sup>1</sup>, Kridanto Surendro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Sistem Informasi ITB, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

<sup>2</sup>Information System Research Group STEI ITB Bandung

E-mail: <sup>1</sup>wisnuwijaya@students.itb.ac.id, <sup>2</sup>endro@informatika.org

### ABSTRAKSI

*E-government dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan kondisi atau keadaan tertentu yang mendukung. Kondisi ini dapat diartikan sebagai kesiapan atau readiness. Terkait dengan e-government maka readiness merupakan kondisi atau keadaan kesiapan dari pemerintah dan masyarakat pengguna terkait dengan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tingkat kesiapan yang dicapai memiliki korelasi positif dengan keberhasilan dalam mencapai tahap pengembangan e-government suatu kabupaten atau kotamadya. Makalah ini akan memaparkan kajian secara teoritis tentang model pendekatan e-government readiness sebuah kabupaten atau kotamadya di Indonesia.*

**Kata kunci:** *Clustering, partitional, incremental, distance.*

### 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab perubahan secara efektif telah menjadi tujuan yang diupayakan terus menerus oleh berbagai kalangan. Perubahan ini merupakan upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat yaitu tuntutan akan pelayanan publik yang lebih baik dan keinginan agar aspirasi masyarakat didengar terutama dalam perumusan kebijakan publik. (Inpres no 3 Tahun 2003). Model pemerintahan yang diharapkan ini dikenal sebagai e-government. Perlu dicatat bahwa e-government tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses administrasi pemerintahan tetapi lebih kepada bagaimana menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuatu hal yang perlu disadari bahwa pengembangan e-government terkait erat dengan kecenderungan terbentuknya masyarakat informasi didunia. Kecenderungan global inilah yang disadari pengaruhnya dimasyarakat.

Upaya mengembangkan masyarakat informasi telah dirumuskan dalam Inpres no 3 tahun 2003 sebagai sebuah upaya nasional. Dalam lingkup yang lebih sempit upaya ini telah dilakukan secara terus menerus oleh berbagai kabupaten atau kotamadya bahkan ditingkat propinsi, antara lain komitmen pengembangan cyberprovince oleh Propinsi DIY, pengembangan e-kebumen dll. Secara bertahap pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menuju terbentuknya masyarakat informasi. Pengembangan e-government memiliki kaitan yang erat dengan pengembangan masyarakat informasi tersebut.

Transformasi sebuah pemerintahan kabupaten atau kotamadya menuju e-government merupakan sebuah proses yang bertahap. Untuk mencapai setiap tahapan yang ditentukan maka diperlukan kesiapan

yang meliputi kesiapan dari sisi pemerintah maupun kesiapan dari sisi masyarakat pengguna, baik individu maupun dari kalangan bisnis. Kesiapan pemerintah perlu diukur karena pemerintah merupakan aktor utama dalam pengembangan e-government. Kesiapan masyarakat pengguna perlu diukur mengingat bahwa masyarakat merupakan pasar utama dari e-government

### 2. BEBERAPA PENGERTIAN E-GOVERNMENT DAN E-READINESS

Pemerintah Republik Indonesia maupun beberapa organisasi internasional telah merumuskan pengertian mengenai e-government. Berdasarkan Inpres no 3 tahun 2003 e-government dipahami sebagai upaya terstruktur untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. E-government dapat pula dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan aplikasinya oleh pemerintah sehingga terjadi proses manajemen pemerintahan yang efisien. Tujuan e-government adalah menyediakan informasi kepada warga, pelayanan yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat melalui ketersediaan akses terhadap ICT dan partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. (*e-government readiness report 2005, UN*). Hal penting yang perlu ditegaskan bahwa e-government terkait erat dengan efisiensi dan efektifitas layanan publik oleh pemerintah.

Perlunya transformasi pemerintahan menuju e-government merupakan akibat dari kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran ini menyebabkan munculnya peluang dan tatanan baru secara global. Tatanan baru ini dikenal sebagai era informasi dimana keunggulan akan dipengaruhi oleh penguasaan akan informasi. Hal ini menuntut transformasi model pemerintahan menuju e-government yang diharapkan dapat mengantisipasi

perkembangan tersebut. Transformasi menuju e-government memerlukan pre-condition yang mendukung terwujudnya capaian e-government. Pre-condition diperlukan agar transformasi dapat berjalan dengan baik atau kondisi yang diharapkan dapat tercapai. Kondisi yang diharapkan dapat diukur berdasarkan tahap pengembangan e-government yang ditetapkan oleh berbagai lembaga dunia seperti PBB, Worldbank maupun menurut Inpres no 3 Tahun 2003.

Pre-condition yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari e-government dapat diartikan sebagai readiness atau kesiapan. E-readiness didekati sebagai sebuah kesiapan terkait dengan penerapan teknologi informasi dan informasi dalam sebuah masyarakat. E-readiness diperlukan agar transformasi menuju masyarakat sadar informasi atau dikenal sebagai masyarakat informasi dapat berjalan dengan baik.

Berbagai definisi mengenai e-readiness merumuskan aspek aspek yang hampir sama yang mempengaruhi e-readiness antara lain e-leadership, ICT infrastruktur, Lingkungan bisnis, SDM dan masyarakat, budaya lokal, security informasi.(bdk. *e-government readiness report 2005*, UN; Inpres no 3 tahun 2003; Mcconnel International, *Accelerating e-government e-readiness at work*).Walupun tidak semua definisi yang dikeluarkan menggunakan semua aspek seperti diatas. Perbedaan yang muncul disebabkan konteks pendekatan yang digunakan berbeda beda. UN merumuskan e-readiness terkait dengan bagaimana pemerintah memanfaatkan ICT untuk menyediakan akses dan inclusion bagi warga negaranya(UN, *Global E-government readiness 2005*). Beberapa organisasi internasional seperti Mcconnel International merumuskan e-readiness terkait dengan kapasitas untuk berpartisipasi dan memanfaatkan peluang dari ekonomi digital.(Mcconel International, *Accelerating e-government e-readiness at work*). Dalam inpres no 3 tahun 2003 dapat ditemukan bahwa readiness merupakan bagian dari aspek aspek yang perlu potret pada saat ini untuk mengukur kondisi saat ini yang telah tercapai terkait dengan pengembangan e-government. Hampir semua rumusan pemahaman mengenai e-readiness terkait dengan kecenderungan dunia menuju era informasi.

### 3. TAHAPAN E-GOVERNMENT

Proses transformasi menuju e-government dipahami oleh berbagai pihak bersifat evolutif. Maka muncul berbagai standar tahapan e-government yang dikeluarkan oleh world bank, PBB maupun oleh Pemerintah Indonesia(inpres no 3 tahun 2003). Mengingat bahwa pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan aturan hukum yang mengatur mengenai pengembangan e-government salah satunya adalah tahapan e-government maka sepantasnya standrad tersebut yang digunakan sebagai acuan saat ini.

Tahapan e-government menurut inpres no 3 tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- Tingkat 1 - **Persiapan** yang meliputi:
  - Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
  - Penyiapan SDM;
  - Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center*, Warnet, *SME-Center*, dll;
  - Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
- Tingkat 2 - **Pematangan** yang meliputi :
  - Pembuatan situs informasi publik interaktif;
  - Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;
- Tingkat 3 - **Pemantapan** yang meliputi :
  - Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;
  - Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- Tingkat 4 - **Pemanfaatan** yang meliputi :
  - Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

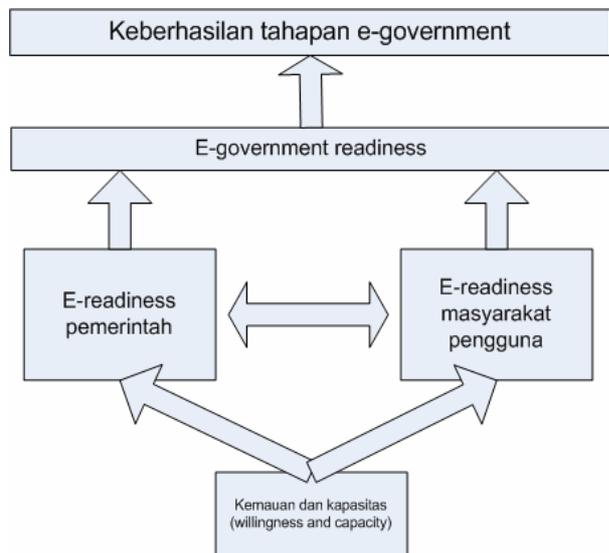
### 4. MODEL E-READINESS DAN KEBERHASILAN E-GOVERNMENT

Kerangka berpikir yang digunakan dalam mengembangkan model ini adalah sebagai berikut:

- a. E-readiness merupakan sebuah kondisi terkait dengan keberhasilan pengembangan e-government.
- b. Terdapat stakeholder yang terkait erat dengan penerapan e-government yaitu pemerintah, masyarakat yang terdiri atas individu dan organisasi profit dan nonprofit.
- c. E-readiness merupakan kesiapan stake holder tersebut. Pendekatan pengukuran dilakukan dengan mengukur kemauan dan kemampuan stake holder tersebut dalam konteks penerapan e-government.
- d. E-readiness mempengaruhi capaian dalam tahapan e-government. Keberhasilan pemerintah untuk mencapai tahap e-government pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh e-readiness pemerintah maupun masyarakat pengguna.

E-readiness pemerintah dan e-readiness masyarakat pengguna akan saling mempengaruhi. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut jika sebuah masyarakat memiliki e-readiness yang cukup baik sedangkan pemerintah memiliki e-readiness dengan tingkat dibawahnya maka akan muncul tuntutan atau aspirasi masyarakat akan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya jika pemerintah memiliki e-readiness lebih baik maka pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan e-readiness masyarakat. Hal perlu diperhatikan mengingat bahwa karakteristik

kabupaten atau kotamadya di Indonesia sangat beragam.



Gambar 1. Model e-government readiness.

Kemauan dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan sesuatu hal. Kemauan ini meliputi e-leadership dan budaya lokal yang mempengaruhi persepsi masyarakat akan ICT. Persepsi masyarakat akan ICT akan mempengaruhi kemauan menggunakan fasilitas ICT. (bdk Zlatko J Kovačić, The Impact of National Culture on Worldwide eGovernment Readiness).

Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan atau ketersediaan terkait dengan tujuan tertentu. Kemampuan ini terkait dengan sisi SDM, infrastruktur yang tersedia, anggaran pemerintah yang dapat disediakan maupun kondisi penghasilan masyarakat.

Tabel 1. kemauan dan kapasitas pemerintah

| No | aspek                         | Kemauan (willingness) | Kapasitas (capacity) |
|----|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1  | Budaya-Adopsi ICT(acceptance) | √                     |                      |
| 2  | Infrastruktur ICT             |                       | √                    |
| 3  | SDM(ICT literacy)             |                       | √                    |
| 4  | Lingkungan bisnis             |                       | √                    |
| 5  | keuangan(harga)               |                       | √                    |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

- E-government dapat dipahami sebagai upaya upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- E-government merupakan akibat kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi tatanan global dan membawa nilai nilai baru yang bersifat universal. Tatanan baru yang terbentuk adalah menuju masyarakat informasi

- Sebuah pre-condition diperlukan untuk melakukan transformasi pemerintahan menuju e-government, kondisi ini dipahami sebagai e-readiness.
- Pengukuran e-readiness perlu dilakukan pada sektor pemerintahan sebagai aktor utama e-governement maupun pada masyarakat pengguna sebagai pasar dari e-government.
- Perlu penelitian lebih lanjut dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan e-government terutama unsur pemerintah untuk membuktikan model yang dikembangkan.

Tabel 2. Kemauan dan kapasitas masyarakat.

| No | aspek  | Kemauan (willingness) | Kapasitas (capacity) |
|----|--|-----------------------|----------------------|
| 1  | e-leadership (prioritas dalam organisasi pemerintah) | √                     |                      |
| 2  | Budaya-adopsi teknologi                              | √                     |                      |
| 2  | Infrastruktur ICT                                    |                       | √                    |
| 3  | SDM(ICT literacy)                                    |                       | √                    |
| 4  | Sumber keuangan                                      |                       | √                    |

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Doctor, Roslyn. *Accelerating e-government, e-readiness at work*, Mcconell International.
- Economics Intelligent Unit, *e-readiness ranking 2005*.
- Economics Intelligent Unit, *e-readiness ranking 2005, white paper*.
- Eready for what? Ereadiness in developing countries current status and the millenium development goal*; [www.bridges.org](http://www.bridges.org)
- E-readiness asesment:who is doing what and where?*; [www.bridges.org](http://www.bridges.org)
- E-readiness assesment tool comparison*; [www.bridges.org](http://www.bridges.org)
- India: E-readiness asesment report 2004*, Department of Information Technology (DIT), Pemerintah India.
- Kovavic, J Zlatko,"the impact of national culture on wolrdwide e-governemnt readiness", *informing science journal* 2005
- Pemerintah Republik Indonesia, Inpres No 3 tahun 2003.
- Ready!net go*; Mcconell International.
- Southern africa development community-world economic forum: *conslutation report on e-readiness; global digital divide initiative on policies and strategies 2001/2002*.
- United Nations, *Global E-government readiness report 2005*.
- Vosloo, Steve; *e-Government and the e-Readiness of NPOs in the Western Cape*; Centre of e-innovation provincial government of western cape.

